

Judul : Dukung pendidikan gratis, DPR: negara punya kemampuan fiskal
Tanggal : Minggu, 27 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung Pendidikan Gratis DPR: Negara Punya Kemampuan Fiskal

ANGGOTA Komisi X DPR Bramantyo Suwondo mendukung rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Rencana itu mesti ditopang kemampuan fiskal negara. Diyakininya, kekuatan fiskal negara benar-benar mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program nasional tersebut.

Dia mengatakan, aspek mutu juga jadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan mutu SDM di dalam ekosistem pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi wajib ditopang penuh oleh kehadiran guru, dosen, serta tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi prima dan berdedikasi tinggi.

Sejalan dengan itu, keberlanjutan pembiayaan negara harus dipastikan secara matang. Agar pelaksanaan kebijakan itu tidak sampai mengurangi standar kualitas layanan pendidikan nasional yang ada saat ini. "Gagasan pendidikan gratis merupakan langkah awal yang baik untuk memperluas akses belajar masyarakat," ucapnya.

Terkait kemampuan fiskal, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengungkapkan, kebutuhan anggaran pendidikan gratis SD hingga perguruan tinggi mencapai Rp 302 triliun. Pemetaan sementara menunjukkan jenjang SD sampai SMA memerlukan Rp 210 triliun, sedangkan perguruan tinggi diperkirakan membutuhkan Rp 92 triliun.

Dia menyebut, Pemerintah belum akan langsung mengalokasikan seluruh kebutuhan anggaran belanja tersebut

dalam APBN. "Untuk tahap awal pelaksanaan, Banggar DPR baru menganggarkan dana sebesar Rp 5 triliun yang dialokasikan khusus sebagai proyek percontohan program pendidikan gratis nasional," jelasnya.

Said merekomendasikan proyek percontohan program pendidikan gratis tersebut diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah awal ini sangat strategis untuk menguji efektivitas skema pembiayaan sebelum diterapkan secara menyeluruh di berbagai daerah lain.

Implementasi pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, lanjutnya, tidak bisa dilakukan sekaligus karena memerlukan persiapan tata kelola yang matang. "Pelaksanaan program itu ditargetkan mulai terealisasi bertahap pada 2028 dengan cakupan awal sekitar 60 hingga 75 persen," ucapnya.

Dari sisi Pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Suhastika Nazara menyampaikan, pihaknya sedang menyusun peta besar pelaksanaan program pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran belanja negara dapat memberikan manfaat secara maksimal, termasuk anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp 824 triliun.

Dia bilang, Pemerintah perlu meninjau kembali desain serta efektivitas pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Evaluasi menyeluruh itu mencakup indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, hingga pencapaian hasil Programme for International Student Assessment. ■ PYB